

Jakpreneur sebagai Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Mempersiapkan ketahanan UMKM dalam Menghadapi RCEP

Yosua Saut Marulitua Gultom, Riesky Ramdhani Saefulloh, Azzahra Maharani
*Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Jakarta Selatan, Indonesia*

Abstract

This article examines the opportunities and challenges faced by the Jakarta Provincial Government's initiative through the Jakpreneur program in increasing the resilience of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) amid the complexity of the RCEP regional trade agreement. This research is qualitative-based to see how Jakpreneur plays a role in facing RCEP. RCEP emphasizes the importance of MSMEs as a way to overcome the challenges of developing countries in the global supply chain. In Jakarta, the Jakpreneur program aims to empower MSMEs through training, access to financing, market linkages, and policy support, preparing them to take advantage of RCEP opportunities. The authors highlights the interaction between Jakpreneur and RCEP, providing a descriptive overview of Jakpreneur to strengthen MSMEs to face the free market. The conclusion of the article emphasizes the importance of special and different treatment for developing countries in RCEP, as well as the role of Jakpreneur in facilitating Jakarta MSMEs. Challenges faced include low competitiveness, limited access to financing, and inadequate infrastructure, but there are opportunities such as broader market access, international cooperation, and access to technology that can improve the competitiveness and efficiency of Jakarta MSMEs.

Keywords: *Economic Resilience, Jakpreneur, MSMEs, RCEP*

Abstrak

Artikel ini mengkaji peluang dan tantangan yang dihadapi oleh inisiatif Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui program Jakpreneur dalam meningkatkan ketahanan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tengah kompleksitas perjanjian perdagangan regional RCEP. Penulis dalam penelitian ini berbasis kualitatif untuk melihat bagaimana Jakpreneur berperan dalam menghadapi RCEP. RCEP menekankan pentingnya UMKM sebagai cara mengatasi tantangan negara berkembang dalam rantai pasokan global. Di Jakarta, program Jakpreneur bertujuan memberdayakan UMKM melalui pelatihan, akses pembiayaan, hubungan pasar, dan dukungan kebijakan, mempersiapkan mereka untuk memanfaatkan peluang RCEP. Penulis menyoroti interaksi antara Jakpreneur dan RCEP, memberikan gambaran deskriptif terhadap Jakpreneur untuk memperkuat UMKM menghadapi pasar bebas. Kesimpulan artikel menegaskan pentingnya *special and different treatment* untuk negara berkembang dalam RCEP, serta peran Jakpreneur dalam memfasilitasi UMKM Jakarta. Tantangan yang dihadapi meliputi daya saing rendah, keterbatasan akses pembiayaan, dan infrastruktur yang kurang memadai, namun terdapat peluang seperti akses pasar yang lebih luas, kerja sama internasional, dan akses teknologi yang dapat meningkatkan daya saing dan efisiensi UMKM Jakarta.

Kata kunci: Jakpreneur, Ketahanan Ekonomi, UMKM, RCEP

1. PENDAHULUAN

RCEP atau *Regional Comprehensive Economic Partnership* adalah perjanjian yang diinisiasi ASEAN sebagai kerja sama kawasan di mana kerja sama ini melibatkan negara-negara mitra ekonomi ASEAN: Jepang, Korea Selatan, India, Australia, Cina, dan New Zealand. Kesepakatan RCEP dilakukan pada tahun 2011 ketika KTT ASEAN ke-19 di Bali, dan negosiasinya baru diluncurkan pada tahun 2012 yang bertepatan pada ASEAN Summit. Dalam memahami RCEP, terdapat isi perjanjian, tujuan, target, dan fitur-fitur utama yang menjadi daya tarik pembentukan kerja sama. Isi dari perjanjian RCEP meliputi pemulihan perdagangan, ketentuan asal barang, kepabeamanan dan fasilitas perdagangan, persaingan usaha, dan e-commerce dengan tujuan agar tarif diturunkan, perdagangan jasa dibuka, dan mendorong masif investasi terutama negara-negara berkembang supaya dapat bersaing dengan ekonomi global (Kemendag RI, 2023). Target yang dilakukan RCEP untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut adalah dengan menggunakan kerja sama ekonomi yang adil, optimalisasi kualitas kerja sama yang tinggi sehingga menguntungkan pihak fasilitator, yang dalam hal ini adalah negara, ketika ekspansi perdagangan dan investasi. Empat komponen di dalam target RCEP mencakup modernitas, komprehensif, *high quality*, dan mutual benefit (Tao et al, 2022). RCEP menjadi kerja sama yang cukup jeli dalam melihat realitas yang sedang berlangsung, dengan adanya e-commerce, UMKM, dan kompetisi pasar masa kini. RCEP dalam hal ini mengandung pasal-pasal yang lebih mendalam daripada AFTA (Chaisse & Pomfret, 2019), membahas masalah-masalah mikro yang memiliki urgensi untuk mendorong keterlibatan negara-negara berkembang dalam rantai pasokan global dan regional.

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan inisiatif Jakpreneur untuk memberdayakan UMKM di Jakarta. Jakpreneur atau *Jakarta Entrepreneur* adalah platform kreasi, fasilitasi, dan kolaborasi pengembangan UMKM melalui ekosistem kewirausahaan, seperti start-up, institusi pendidikan, maupun institusi pembiayaan (Pemprov DKI Jakarta, 2023). Jakarta Entrepreneur dapat berbentuk kerja sama jangka panjang atau bentuk kegiatan lainnya, yang berpotensi untuk mengembangkan keterampilan dan kemandirian usaha. Program ini meliputi berbagai inisiatif, termasuk lokakarya peningkatan kapasitas, akses ke pembiayaan, hubungan pasar, dan dukungan kebijakan. Lokakarya peningkatan kapasitas memberikan pelatihan dan pengetahuan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Akses ke pembiayaan menyediakan akses yang lebih mudah ke pembiayaan bagi UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Hubungan pasar membantu UMKM mengakses pasar yang lebih luas, baik domestik maupun internasional. Dukungan kebijakan mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan ketahanan UMKM. Hal ini bisa dilakukan dengan cara kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan lembaga pendidikan, pelaku usaha, masyarakat, dan/atau lembaga/pihak lainnya. Bergabung dengan Jakpreneur memungkinkan untuk membangun jaringan dalam lingkup kewirausahaan lainnya. Selain itu, Hal tersebut juga membantu menemukan peluang bisnis baru dan mempromosikan bisnis kepada jaringan yang lebih luas. Jakpreneur dapat memanfaatkan peluang yang dihadirkan oleh perjanjian perdagangan seperti RCEP. Dengan mempersiapkan UMKM agar lebih siap dan tangguh, inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat mengambil keuntungan dari peluang baru dan mengatasi tantangan yang ada (Aulia, 2023). Dengan demikian, UMKM tidak hanya dapat bertahan tetapi juga berkembang di tengah kompleksitas perjanjian perdagangan regional.

Penulis melalui artikel ini ingin mempertanyakan “Bagaimana Jakpreneur sebagai salah satu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat berperan dalam mempersiapkan ketahanan UMKM dalam menghadapi perjanjian regional RCEP?”. Dengan menyoroti interaksi tersebut, artikel ini berupaya untuk memberikan gambaran deskriptif terhadap kebijakan Jakpreneur yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. terhadap ketahanan ekonomi dalam memasuki pasar bebas regional RCEP.

2. TINJAUAN LITERATUR

Penulis dalam bagian ini berupaya untuk memberikan beberapa tinjauan literatur, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan ekonomi serta UMKM dalam hubungan Internasional. Ketahanan ekonomi dapat diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang mencakup keuletan dan ketangguhan, serta kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari luar maupun dalam negeri, baik yang langsung maupun tidak langsung. Tujuannya adalah untuk menjamin kelangsungan hidup perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Marlinah, 2017). Untuk mewujudkan ketahanan ekonomi, diperlukan dukungan yang signifikan dalam bentuk sistem perekonomian yang kuat dan mandiri. Sistem ini harus bertumpu pada ketahanan serta kemampuan bangsa sendiri, baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang berkualitas. Keberadaan sumber daya alam yang melimpah harus dikelola dengan bijaksana dan berkelanjutan, sementara sumber daya manusia yang terampil dan berpendidikan tinggi menjadi kunci untuk mengolah dan memanfaatkan sumber daya tersebut secara optimal. Dengan demikian, perekonomian tidak mudah goyah menghadapi berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Menurut Suprihanto & Armawi (2016) ketahanan ekonomi merupakan konsep yang kompleks dan multi-dimensional, mencerminkan kemampuan suatu negara atau komunitas untuk mempertahankan stabilitas ekonominya dalam menghadapi berbagai tantangan dan gangguan, seperti krisis ekonomi, bencana alam, dan perubahan global. Salah satu metode untuk mengukur ketahanan ekonomi adalah dengan menganalisis jumlah penghasilan atau pengeluaran per rumah tangga dalam jangka waktu tertentu, kemudian membandingkannya dengan batas kemiskinan yang telah ditetapkan.

Jika dikaitkan dengan pengembangan ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi kreatif berkelanjutan dilakukan dengan resiliensi, yaitu menjaga resiliensi dari sistem ekonomi, sosial, lingkungan, kelembagaan, dan perilaku dengan memberdayakan seluruh potensi ketahanan ekonomi dalam menghadapi ketidakpastian perekonomian dan tantangan persaingan global yang semakin kompleks. Hal ini dilakukan dengan mengantisipasi segala faktor yang menyebabkan kerentanan (*vulnerability*) ekonomi kreatif demi keberlanjutan (*sustainability*) pengembangan ekonomi kreatif. Dengan demikian, Indonesia dapat memiliki ketahanan ekonomi (*economic resilience*) yang kuat, khususnya dalam sektor ekonomi kreatif. Resiliensi ini memastikan bahwa sektor ekonomi kreatif tetap mampu bertahan dan berkembang meskipun menghadapi berbagai tekanan dan gangguan, sehingga berkontribusi pada stabilitas dan ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan (Romarina, 2016).

Jika dikaitkan dengan studi Hubungan Internasional, Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) memiliki peran dalam sistem perdagangan yang dapat mendunia atau dapat berkembang hingga memiliki dampak di arena internasional. Devi (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa globalisasi saat ini telah banyak memberikan dampak pada aktor Hubungan Internasional, tidak terkecuali UMKM. Sebagai salah satu hal yang mempengaruhi ekspor suatu negara hingga memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian nasional membuat UMKM menjadi salah satu aktor dalam Hubungan Internasional. Tantangan UMKM sebagai pelaku Hubungan Internasional tentu saja dengan caranya meningkatkan kemampuan dalam menghadapi globalisasi dan bersaing dengan pelaku usaha lainnya dalam menggunakan teknologi. Maka dari itu, UMKM didorong dalam untuk meningkatkan kekuatan internasional melalui digitalisasi. Dalam penelitiannya, Malecka (2017) menyampaikan bahwa tidak semua perusahaan yang berada di dalam skala nasional akan menjadi internasional, namun, bukan berarti hal itu tidak mungkin terjadi. Malecka telah meneliti bahwa setelah bergabungnya dengan Uni Eropa, negara Polandia telah memanfaatkan UMKM dengan efisien yang berdampak pada meningkatnya jumlah dan belanja modal mereka, yang mana UMKM dengan pilihan apah perdagangan luar telah memberikan efek langsung kepada pendapatan, pengeluaran, dan profitabilitas. Para wirausahawan tidak takut untuk mengubah atau memperluas kegiatan bisnis mereka, dengan artian bahwa internasionalisasi dan

globalisasi UMKM akan terus meluas dengan harapan pelaku usaha pada negara dalam memberikan dukungan investasi dan pembiayaan yang merupakan aspek paling 'mahal' dalam pengembangan kegiatan skala internasional. Sama halnya dengan Ariyani (2022) yang dalam penelitiannya menyatakan bahwa dewasa ini sudah banyak yang sadar akan pentingnya internasionalisasi sebagai pendukung perkembangan perusahaan agar semakin meningkat seiring dengan berbagai kesempatan yang telah terbuka untuk perusahaan terlibat dalam rantai global. Dengan adanya keterbukaan perdagangan memberikan kesempatan bagi pelaku usaha UMKM dalam melakukan internasionalisasi yang dapat mendorong UMKM dalam berkembang melalui pasar internasional. Ariyani juga menyampaikan bahwa pengembangan SDM melalui bimbingan, pelatihan dan pendampingan khusus bagi para pelaku usaha UMKM diperlukan untuk mendorong sebuah perkembangan.

Masih berkaitan dengan sebelumnya, Westerlund (2020) menyatakan bahwa meskipun digitalisasi ekonomi global memberikan peluang bagi para pelaku usaha untuk melakukan internasionalisasi, namun, beberapa UMKM tidak mampu untuk melakukan digitalisasi dan menjadikan internasionalisasi UMKM sebagai tantangan bagi mereka. Maka dari itu, Westerlund menunjukkan bahwa UMKM yang ingin tumbuh melalui internasionalisasi digital memerlukan perkembangan serangkaian kemampuan, terutama dalam hal mitra, hubungan dengan pelanggan, dan manajemen. Penelitian Westerlund juga menegaskan bahwa meski pelaksanaan internasionalisasi UMKM ini dapat meningkatkan kinerja perusahaan, namun, hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyaknya resiko kegagalan terjadi di dalamnya.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada studi pustaka untuk menjelajahi berbagai upaya yang telah dilaksanakan atau direncanakan oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghadapi dampak perubahan ekonomi dan persaingan akibat Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Metode ini diambil karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi dan lebih memahami kompleksitas suatu fenomena untuk membuatnya dapat dijelaskan kepada pembaca (Mohajan, 2018). Dengan melakukan analisis mendalam terhadap literatur yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara komprehensif langkah-langkah konkret yang telah diambil atau direncanakan untuk meningkatkan ketahanan UMKM dalam menghadapi dampak dari perjanjian perdagangan regional tersebut. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat teridentifikasi strategi dan upaya yang efektif dalam mempersiapkan UMKM DKI Jakarta menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh RCEP, serta mengevaluasi keberhasilan dan tantangan implementasi kebijakan yang telah dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Kemunculan RCEP dan implikasinya terhadap UMKM

Pada KTT ASEAN ke-19 di bulan November 2011, ASEAN mengusulkan mega-FTA Asia Timur baru yang dipimpin oleh ASEAN yang kemudian berkembang menjadi RCEP, sebagai perpanjangan dari CEPEA dan EAFTA, dan ASEAN+1 FTA. Hal ini dikarenakan ASEAN ingin mempertahankan sentralitasnya dalam kerja sama regional di kawasan dan membentuk integrasi ekonomi. Untuk memuaskan setiap pihak di kawasan, ASEAN mengejar prinsip "*second best choice*" dengan mengusulkan dan memimpin RCEP, dibanding mengikuti TPP yang diinisiasi kekuatan eksternal, yakni Amerika Serikat. Bagi ASEAN, kerangka kerja sama regional di kawasan Asia-Pasifik adalah yang terbaik (Shimizu, 2021). Terlebih lagi, RCEP menjadi FTA pertama yang mencoba menyatukan negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Cina, dan Korea Selatan.

Pada perjanjian perdagangan antara negara, ketentuan terkait UMKM biasanya diatur dalam bagian ketentuan terkait entitas bisnis. Artinya UMKM disamakan statusnya dengan entitas bisnis lain seperti perusahaan-perusahaan besar, meskipun terkadang terdapat ketentuan khusus terkait UMKM tergantung hasil negosiasi yang dilakukan oleh negara.

Ketentuan-ketentuan terkait UKM dalam FTA regional pada umumnya dikategorikan ke dalam ketentuan-ketentuan untuk kerja sama, pengecualian/pembebasan, dan transparansi. Ketentuan yang terkait dengan kerja sama relatif lazim, diikuti dengan langkah-langkah transparansi. Namun, mekanisme kerja sama tidak selalu rinci, eksplisit, dan rumit untuk membawa perubahan penting melalui keterlibatan UKM yang lebih besar dalam pertukaran perdagangan, sementara langkah-langkah transparansi terutama bertujuan untuk partisipasi UKM yang lebih kuat dalam pengadaan pemerintah dan meningkatkan prediktabilitas lingkungan bisnis (Tandon, 2021).

Lebih dari 90% perusahaan bisnis di semua negara RCEP diisi oleh industri UMKM. Perusahaan-perusahaan ini sering menghadapi tantangan signifikan yang menghambat mereka untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari FTA. Beberapa kebijakan dapat dilakukan untuk menjawab masalah tersebut. Salah satunya adalah dengan mengadopsi perlakuan khusus dan berbeda (*special and differential treatment*) yang memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi negara kurang berkembang untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan FTA. Yang lainnya adalah penyediaan bantuan ekonomi dan teknis bagi negara-negara kurang berkembang untuk memungkinkan mereka berpartisipasi dalam FTA secara lebih efektif. Bantuan tersebut mencakup langkah-langkah peningkatan kapasitas yang menargetkan pemangku kepentingan yang relatif kurang beruntung seperti UMKM (Hsieh, 2022).

Menurut ADB (2020), UMKM mewakili rata-rata 97,2% dari seluruh perusahaan dari tahun 2010 hingga 2019. UMKM juga merupakan memberikan lapangan pekerjaan yang signifikan, menyediakan antara 51,7% dan 97,2% dari total lapangan kerja, khususnya di negara-negara Asia. Karakteristik penting dari UMKM adalah konsentrasinya di sektor jasa. ADB memperkirakan 61% hingga 89% UMKM beroperasi di sektor jasa, sementara hanya 5% hingga 17% di sektor manufaktur. Lanskap ini menunjukkan bahwa dominasi UMKM di sektor yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*) dapat membatasi kemampuan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan manfaat peningkatan perdagangan yang diberikan oleh FTA seperti RCEP.

UKM umumnya menunjukkan produktivitas yang lebih rendah dan kecenderungan untuk melakukan ekspor yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang lebih besar, yang berarti bahwa FTA seperti RCEP kemungkinan akan lebih menguntungkan bagi bisnis besar. Meskipun UKM dapat memperoleh keuntungan dari pengurangan biaya dan peningkatan kualitas input impor di bawah RCEP, manfaat ini diperkirakan akan lebih terbatas dibandingkan dengan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan besar. Selain itu, meskipun ada pengurangan hambatan perdagangan, UKM seringkali kesulitan untuk berinvestasi dalam inovasi karena sumber daya mereka yang terbatas dan tidak memiliki skala ekonomi yang diperlukan untuk mengelola biaya tetap yang terkait dengan ekspor. Selain itu, pengurangan hambatan perdagangan akan meningkatkan tekanan persaingan pada UKM yang berfokus di dalam negeri (Verico & Pangestu, 2021).

Perjanjian RCEP melalui bab 14 berfokus pada UKM. Tujuan yang dinyatakan dalam bab ini adalah untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam memanfaatkan dan mendapatkan keuntungan dari peluang yang diciptakan oleh perjanjian tersebut. Perjanjian ini juga menetapkan dua pendekatan untuk mencapai tujuan ini, yaitu, promosi berbagi informasi dan kerja sama. Pembagian informasi di bawah RCEP akan dilaksanakan dengan membangun dan memelihara platform informasi yang dapat diakses publik, yang akan memfasilitasi pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik di antara negara-negara anggota (Naskah Hukum RCEP, 2022). Platform ini akan menampilkan teks lengkap perjanjian RCEP, informasi tentang undang-undang dan peraturan terkait perdagangan dan investasi yang relevan bagi UKM, dan informasi tambahan terkait bisnis yang dapat membantu UKM memanfaatkan peluang yang disediakan oleh RCEP. Kegiatan-kegiatan yang diuraikan untuk kerja sama di bawah Bab UKM sangat luas dan mencakup beberapa bidang yang luas, tertuang pada pasal 14 ayat (3) perjanjian RCEP. Hal ini termasuk mendorong implementasi aturan dan regulasi perdagangan yang efisien dan transparan, meningkatkan akses pasar dan

partisipasi UKM dalam rantai nilai global dengan memfasilitasi kemitraan bisnis, dan mempromosikan penggunaan e-commerce di kalangan UKM. Selain itu, bab ini bertujuan untuk mengeksplorasi peluang untuk bertukar pengalaman dari program kewirausahaan, mendorong inovasi dan penggunaan teknologi, serta meningkatkan pemahaman dan pemanfaatan UKM terhadap sistem kekayaan intelektual. Bab ini juga berfokus pada promosi praktik-praktik regulasi yang baik, membangun kapasitas untuk regulasi yang mendukung UKM, dan berbagi praktik terbaik untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing UKM. Menelaah kegiatan-kegiatan yang relevan dengan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis, satu pertanyaan yang muncul adalah apakah kegiatan-kegiatan tersebut harus terbatas pada LDCs ASEAN. Banyak negara ASEAN berpenghasilan menengah, terutama Indonesia, mungkin memerlukan pengembangan kapasitas dan bantuan teknis di beberapa bidang (Lee, 2022).

b. Peran Jakpreneur terhadap UMKM di DKI Jakarta

Dalam upaya pengembangan Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM) yang memiliki banyak potensi untuk mengembangkan perekonomian negara. Kota Administrasi Jakarta memiliki salah satu program bernama Jakarta Entrepreneur atau sering dikenal dengan singkatan "Jakpreneur" yang dibuat pemerintah Kota Jakarta dalam rangka mengembangkan bisnis usaha mikro dan menengah khususnya di tengah masyarakat Jakarta dengan menjadi wadah untuk mengembangkan kreasi, berkolaborasi, dan menjadi fasilitas untuk berbagai kalangan masyarakat Jakarta dalam mengembangkan usahanya. Program Jakpreneur diusung oleh Gubernur Provinsi Jakarta dan ditetapkan melalui Pergub Nomor 2 Pasal 1 ayat 6 Tahun 2020 yang berisi tentang penyelenggaraan pengembangan kewirausahaan terpadu (Rohimah et al, 2022). Jakpreneur merupakan sebuah program kerja yang diusung langsung oleh Gubernur Anies Baswedan dalam rangka meningkatkan daya saing UMKM yang ada di Jakarta. Setiap pemilik usaha akan diberikan pengarahan, pelatihan, hingga mendapatkan modal untuk mengembangkan usaha UMKM mereka hal ini menjadikan pemilik usaha untuk mendapatkan akses dalam meningkatkan kredibilitas dalam menjalani usaha UMKM-nya.

Dapat dikatakan, program Jakpreneur ini memiliki peran yang cukup penting bagi berkembangnya UMKM yang ada di Jakarta. Hal ini dapat dilihat dari tujuan diadakannya program Jakpreneur ini dan implementasinya bagi masyarakat Indonesia. Dilansir dari situs Jakpreneur, sudah ada lebih dari 370.000 peserta telah bergabung dalam program ini. Dapat dilihat bahwa adanya program Jakpreneur sebagai wadah dan fasilitas masyarakat Jakarta dalam berwirausaha terbantu dengan adanya Jakpreneur. Program ini secara tidak langsung juga dapat meningkatkan digitalisasi masyarakat Indonesia dalam berwirausaha. Mudah akses dalam melaksanakan program Jakpreneur juga memberikan daya tarik kepada anak muda yang ingin segera mengembangkan kewirausahaannya dan ikut andil dalam mengembangkan UMKM Jakarta, bahkan Indonesia. Sebagai wadah bagi pemilik usaha UMKM dan penyedia fasilitas usaha UMKM di Jakarta, tentu saja program Jakpreneur dan banyak pihak di dalamnya memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan perannya sebagai sarana penyedia pengembangan usaha kecil dan menengah. Dalam pelaksanaannya, Jakpreneur memiliki jenis-jenis program yang masing-masing dari jenis program tersebut memiliki fungsi dan perannya tersendiri dalam pengembangan kewirausahaan terpadu masyarakat Kota Jakarta. Masing-masing peran dari jenis program Jakpreneur, yakni: 1) Pelatihan, yang mana pada program ini Jakpreneur memiliki peran sebagai wadah bagi para pelaku usaha untuk mendapat pelatihan teknis maupun non-teknis agar menjadikan pelaku usaha yang kreatif, inovatif, dan mandiri. 2) Pendampingan, yang mana program ini pelaku usaha mendapatkan pendampingan kegiatan usaha, monitoring, serta mendapat evaluasi dalam mengembangkn usaha. 3) Perizinan, pada program ini Jakpreneur memiliki peran memfasilitasi para pelaku usaha untuk mendapatkan izin atas usahanya secara kolektif oleh perangkat daerah, 4) Permodalan, yang mana program ini memiliki peran dalam memfasilitasi kemudahan akses modal untuk para pelaku usaha dari berbagai lembaga terkait. 5) Pemasaran, pada hal ini program Jakpreneur memiliki peran

dengan memfasilitasi program pemasaran para pelaku usaha yang berbasis pada daring, baik dalam lingkup nasional hingga internasional. Serta yang terakhir 6). Pelaporan keuangan, Program Jakpreneur memiliki peran dalam memfasilitasi penyusunan laporan keuangan yang berbasis pada aplikasi untuk memudahkan pelaku usaha (Rohimah et al, 2022).

Jakpreneur memiliki peran yang cukup signifikan dan bermanfaat bagi pengembangan UMKM di wilayah Jakarta. Contohnya, pada wilayah Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara dalam implementasi program Jakpreneur dapat dikatakan bahwa program Jakpreneur ini memiliki peranan yang baik sebagai wadah bagi pengembangan UMKM wilayah tersebut, banyak manfaat dan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat sekitar dengan adanya bantuan program ini, terlebih dengan adanya kemudahan akses di era digitalisasi sekarang (Dini, 2022). Sama halnya dengan implementasi program Jakpreneur pada wilayah Kecamatan Tamansari, Kota Jakarta Barat. Efektivitas adanya program Jakpreneur pada wilayah ini menunjukkan adanya peningkatan pada produktivitas, jumlah, dan kepuasan karyawan, dari segi bisnis UMKM peran Jakpreneur dapat memberikan efek yang positif bagi pemilik usaha dengan hasil pelatihan yang memberikan peningkatan inovasi usaha dan kemandirian perusahaan (Rohimah. et al, 2022). Maka dapat dikatakan secara tidak langsung program Jakpreneur yang hadir di tengah masyarakat Jakarta memiliki peran yang baik dan memberikan dampak yang positif bagi pemilik usaha UMKM maupun pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.

c. Peluang dan Tantangan

Program Jakpreneur, yang digagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di ibu kota. Inisiatif ini memberikan berbagai bentuk dukungan, termasuk pelatihan kewirausahaan, bimbingan bisnis, akses ke permodalan, serta fasilitasi pemasaran dan jaringan. Dengan hadirnya Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia, Jakpreneur memiliki potensi besar untuk membantu UMKM Jakarta memanfaatkan akses pasar yang lebih luas, serta meningkatkan daya saing mereka di pasar internasional (Shimizu, 2021). Terdapat beberapa peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Jakpreneur dalam menghadapi RCEP. Peluang pertama adalah akses pasar lebih luas. RCEP membuka peluang besar bagi UMKM di Jakarta untuk memperluas pasar mereka ke 15 negara anggota perjanjian ini, termasuk ekonomi besar seperti China, Jepang, dan Korea Selatan. Dengan akses pasar yang lebih luas, UMKM memiliki kesempatan untuk meningkatkan volume ekspor dan diversifikasi basis pelanggan mereka. Program Jakpreneur dapat memainkan peran penting dalam membantu UMKM memahami regulasi dan standar internasional yang berlaku di negara-negara anggota RCEP. Melalui pelatihan yang intensif, UMKM dapat belajar tentang persyaratan kualitas, sertifikasi produk, dan prosedur ekspor yang diperlukan untuk memasuki pasar global (Panjaitan et al, 2022). Selain itu, bimbingan dari Jakpreneur dapat membantu UMKM dalam menyesuaikan strategi bisnis mereka agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pasar internasional. Dengan dukungan ini, UMKM Jakarta diharapkan dapat memanfaatkan peluang ekspor yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi ketergantungan pada pasar domestik. Akses pasar yang luas membentuk peluang kedua, yakni potensi kerja sama internasional. RCEP juga membuka peluang bagi UMKM untuk menjalin kerjasama dengan perusahaan di negara-negara anggota lainnya. Ini dapat berupa kemitraan strategis, joint ventures, atau kolaborasi dalam penelitian dan pengembangan.

Program Jakpreneur dapat memfasilitasi terbentuknya kerjasama internasional ini melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah program inkubasi bersama yang memungkinkan UMKM Jakarta dan perusahaan dari negara lain untuk bekerja sama dalam mengembangkan produk atau layanan baru. Selain itu, Jakpreneur dapat menyediakan platform perdagangan yang mendukung interaksi dan jaringan bisnis antara pelaku usaha dari berbagai negara (Kisworo et al, 2022). Peluang ketiga adalah inovasi dan teknologi. RCEP memberikan akses yang lebih mudah bagi UMKM untuk mendapatkan teknologi baru dan

inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka. Teknologi baru dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari proses produksi yang lebih efisien, sistem manajemen rantai pasok yang lebih canggih, hingga alat pemasaran digital yang lebih efektif. Program Jakpreneur dapat mendukung adopsi teknologi ini dengan menyediakan pelatihan yang relevan dan akses ke sumber daya teknologi. Pelatihan yang diberikan dapat mencakup penggunaan perangkat lunak manajemen, teknik produksi modern, dan strategi pemasaran digital. Selain itu, Jakpreneur dapat menjalin kerjasama dengan institusi teknologi dan lembaga penelitian untuk menyediakan akses ke inovasi terbaru bagi UMKM. Dengan dukungan ini, UMKM di Jakarta dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, dan menawarkan produk yang lebih kompetitif di pasar global.

Meskipun begitu, terdapat juga beberapa tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah DKI Jakarta. Pertama, daya saing yang rendah. UMKM Jakarta sering kali masih menghadapi masalah daya saing yang rendah dibandingkan dengan perusahaan besar di negara-negara anggota RCEP lainnya. Untuk mengatasi ini, Jakpreneur perlu fokus pada upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensi UMKM. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan intensif yang mencakup berbagai aspek penting seperti manajemen bisnis, strategi pemasaran, pengelolaan keuangan, dan inovasi produk. Selain itu, Jakpreneur bisa memberikan mentoring dan coaching oleh para profesional berpengalaman untuk membantu UMKM mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi bisnis yang efektif. Kedua, akses pembiayaan. Salah satu kendala utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses yang terbatas ke pembiayaan. Untuk mengatasi masalah ini, Jakpreneur harus bekerja sama dengan lembaga keuangan untuk menyediakan skema pembiayaan yang lebih terjangkau dan mudah diakses oleh UMKM. Ini bisa termasuk pinjaman dengan bunga rendah, program kredit mikro, dan modal ventura.

Selain itu, Jakpreneur dapat membantu UMKM dalam menyusun proposal bisnis yang solid dan menarik bagi investor, serta memberikan pendampingan dalam proses pengajuan pembiayaan. Dengan akses ke pembiayaan yang lebih baik, UMKM dapat memenuhi kebutuhan ekspansi dan meningkatkan kapasitas produksi mereka, sehingga dapat meraih peluang yang lebih besar di pasar global (Permata et al, 2023). Ketiga, infrastruktur dan logistik. Infrastruktur dan logistik yang kurang memadai dapat menjadi hambatan besar bagi UMKM dalam bersaing di pasar global. Masalah seperti akses jalan yang buruk, keterbatasan fasilitas pelabuhan, dan layanan logistik yang mahal dapat menghambat efisiensi operasional dan meningkatkan biaya produksi. Jakpreneur perlu memberikan dukungan dalam bentuk fasilitasi akses ke infrastruktur yang lebih baik serta solusi logistik yang efisien dan terjangkau. Ini bisa termasuk kerjasama dengan pemerintah dan sektor swasta untuk memperbaiki infrastruktur, serta menyediakan platform logistik yang terintegrasi untuk memudahkan proses distribusi. Dengan infrastruktur dan logistik yang lebih baik, UMKM dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing produk mereka di pasar global.

5. KESIMPULAN

RCEP dikembangkan pertama kali setelah adanya usulan mega-FTA Asia Timur oleh ASEAN sebagai perpanjangan dari CEPEA dan EAFTA sebagai bentuk mempertahankan sentralitas kerjasama regionalnya di kawasan dan membentuk integrasi. Lebih dalam lagi, 90% perusahaan bisnis di negara RECP diisi oleh industri UKM yang seringkali menghadapi tantangan-tantangan signifikan yang dapat menghambat dalam berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari FTA, kebijakan yang dapat dilakukan adalah dengan mengadopsi *special and different treatment* untuk memberikan fleksibilitas kepada negara berkembang dan memberikan penyediaan bantuan penyediaan bantuan ekonomi dan teknis bagi negara berkembang agar memungkinkan mereka untuk berpartisipasi dalam FTA. FTA seperti RECP memiliki kemungkinan dapat memberikan keuntungan bagi bisnis yang lebih besar dengan UKM yang menunjukkan adanya produktivitas dan kecenderungan melakukan ekspor yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang besar. Perjanjian RECP melalui bab 14 berfokus kepada UKM yang bertujuan meningkatkan kemampuan UKM dalam memanfaatkan dan

mendapatkan keuntungan dari peluang yang diciptakan oleh perjanjian tersebut. Pembagian informasi di bawah RCEP kemudian akan dilaksanakan dengan membangun platform informasi yang dapat diakses secara publik dan menampilkan teks lengkap perjanjian RECP, undang-undang, dan peraturan mengenai perdagangan dan investasi terkait UKM yang terlibat.

Pelaksanaan UKM dapat terlihat di Indonesia dengan terlaksananya program Jakpreneur yang diusung oleh gubernur Anies Baswedan yang tertuang pada Pergub No. 2 Pasal 1 Ayat 6 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu, dengan fungsi dan perannya yang masing-masing diberikan oleh program Jakpreneur terhadap UKM di Indonesia, khususnya Jakarta. Fungsi dan peran Jakpreneur sebagai wadah yang memfasilitasi para pelaku usaha UKM ini diantaranya adalah menyediakan fasilitas-fasilitas seperti; Pelatihan, Pendampingan, Perizinan, Permodalan, Pemasaran, dan Pelaporan Keuangan. Implementasi Jakpreneur sebagai program yang memfasilitasi tentu saja tidak semua berjalan tanpa hambatan, maka terdapat beberapa peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Jakpreneur. Tantangan tersebut meliputi adanya daya saing yang rendah bagi UMKM Jakarta, kendala pada akses pembiayaan yang terbatas, dan kurangnya infrastruktur dan logistik yang memadai. Selain itu, Jakpreneur memiliki beberapa peluang yang bisa menjadi kesempatan dalam perkembangan kedepannya, yakni adanya akses pasar yang lebih luas dengan RECP yang membuka peluang besar bagi UMKM Jakarta, adanya kerjasama internasional yang juga didukung oleh adanya RECP dengan negara-negara anggota lainnya, serta akses teknologi dan inovasi yang diberikan oleh RECP untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi para pelaku usaha.

REFERENSI

- ADB. (2020, Desember). ASIA SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISE MONITOR 2020. In Volume IV—Technical Note: Designing a Small and Medium-sized Enterprise Development Index. Asian Development Bank. <https://www.adb.org/sites/default/files/publication/659451/asia-sme-monitor-2020-sme-development-index.pdf>
- Ariyani, L. (2022). Memetakan Kebijakan Internasionalisasi Umkm Indonesia. *Trade Policy Journal*, 1(1), 13-18.
- Aulia, D.D. (2023, 3 November). Jakpreneur dan Harapan Memajukan UMKM di Jakarta. *Detik*. Diakses pada 14 Mei 2024 melalui <https://news.detik.com/berita/d-7017834/jakpreneur-dan-harapan-memajukan-umkm-di-jakarta>
- Chaisse, J., & Pomfret, R. (2019). The RCEP and the changing landscape of world trade: Assessing Asia-pacific investment regionalism next stage. *Law and Development Review*, 12(1), 159-190.
- Devi, S. N. (2019). Digitalisasi UKM dalam Ilmu Hubungan Internasional: Studi Kasus Tiongkok. *Jurnal Sentris*, 2(2), 78-87.
- Dini, A. H. (2022). Implementasi Program Jakpreneur pada UMKM Binaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kecamatan Tanjung Priok. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 12(1), 97-107. Retrieved from <https://www.jakpreneur.jakar>
- Hsieh, P. L. (2022). The roadmap to the ASEAN-EU FTA in the post-pandemic era. *Legal Issues of Economic Integration*, 49(2). <https://doi.org/10.54648/leie2022006>
- Kemendag RI. (2023, 2 Januari). Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). *FTA Center Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. Diakses pada 13 Mei 2024 melalui <https://ftacenter.kemendag.go.id/regional-comprehensive-economic-partnership-rcep>
- Kisworo, Y., Paramita, G., Sundawa, R. D., & Musqari, N. (2022). Peningkatan kapasitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Binaan Jakpreneur wilayah Jakarta Timur Melalui

- implementasi digital marketing. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi (JPMEMA)*, 1(1), 7-16.
- Lee, C. (2022). Economic and Technical Cooperation in the Regional Comprehensive Economic Partnership: Focus Areas and Support for Small and Medium sized Enterprises. ERIA Discussion Paper Series. ERIA. <https://www.eria.org/uploads/media/discussion-papers/FY22/Economic-and-Technical-Cooperation-in-the-RCEP-FocusAreas-and-Support-for-Small-and-Medium-sized-Enterprises.pdf>
- Lovita, E., Ardheta, P., Prabantoro, G., Sunarsih, U., Dahlifah, D., Mustika, M., & Nasution, N. (2022). Digitalisasi UKM: Solusi Menjalankan Bisnis di Era Normal Baru Covid-19. *PROGRESIF: Jurnal Pengabdian Komunitas Pendidikan*, 2(1), 50 - 55. <https://doi.org/10.36406/progresif.v2i1.552>
- Malecka, J. (2017). The role of SMEs in international trade: Selected aspects. *Institute of Economic Research (IER)*, 68.
- Marlinah, L. (2017). Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional melalui pengembangan ekonomi kreatif. *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 17(2), 258-265
- Mohajan, H. K. (2018). Qualitative research methodology in social sciences and related subjects. *Journal of economic development, environment and people*, 7(1), 23-48.
- Naskah Hukum RCEP. (2022). Dokumen Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement (RCEP). *FTA Center Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*. <https://ftacenter.kemendag.go.id/cfind/source/files/rcep/document-perjanjian-rcep-1.pdf>
- Panjaitan, A. E., Widjayanti, A., & Sutrisno, E. (2022). The Implementation of Jakarta Entrepreneurship (Jakpreneur) Program in Empowering Small and Medium Enterprises in Kembangan District Administrative City of West Jakarta. *Journal of Business Administration Economics & Entrepreneurship*, 28-36.
- Pemprov DKI Jakarta. (2023, 14 September). Jakarta Entrepreneur. *Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta*. Diakses pada 14 Mei 2024 melalui <https://www.jakarta.go.id/jakpreneur>
- Permata, D., Rosilien, A. R., Cecilia, P., & Darmawan, D. (2023). Pemberdayaan Ekonomi Melalui Jakpreneur Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga di Jakarta. *PASAI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2), 26-30.
- Rohimah, S., Lukman, U., & Sundawa, R. D. (2022). EFEKTIVITAS PERAN JAKPRENEUR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI JAKARTA BARAT (STUDI KASUS PADA UMKM DI KECAMATAN TAMANSARI). *Jurnal Fokus Manajemen Dan Bisnis*, 4(2), 82-108.
- Romarina, A. (2016). Economic Resilience pada industri kreatif guna menghadapi globalisasi dalam rangka ketahanan nasional. *Jurnal Ilmu Sosial*, 15(1), 35-52.
- Shimizu, K. (2021). The ASEAN Economic Community and the RCEP in the world economy. *Journal of contemporary East Asia studies*, 10(1), 1-23. <https://doi.org/10.1080/24761028.2021.1907881>
- Suprihanto, J., & Armawi, A. (2016). Strategi Pengembangan Wirausaha Pemuda Dalam Mewujudkan Wirausahawan Mandiri Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi pada Koperasi Sumekar di Kampung Sanggrahan Pathuk Kecamatan Ngampilan Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 22(1), 42-60.
- Tandon, A. (2021, October). SME Related Provisions in Free Trade Agreements-An Analysis of India's Strategic Focus. *Institut for Studies in Industrial Development. Working Paper*. <https://isid.org.in/wp-content/uploads/2022/12/WP237.pdf>
- Tao, H. O. N. G., Sijia, T. A. O., Sihan, L. U., & Tao, M. A. (2022). Promoting the Role of RCEP in Boosting the High-Quality Development of China's Digital Economy. *Frontiers of Economics in China*, 17(3).

- Verico, K., & Pangestu, M. E. (2021). The economic impact of globalisation in Indonesia. In *Globalisation and its Economic Consequences* (pp. 76-102). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003138501>
- Westerlund, M. (2020). Digitalization, internationalization and scaling of online SMEs. *Technology Innovation Management Review*, 10(4).